

## **BAB IV**

### **ANALISA ALASAN PEMERINTAH JEPANG TIDAK MEMBERIKAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH KOREA UTARA**

Pada Bab ini, akan menjawab rumusan masalah dengan menerapkan kerangka berpikir yang ada serta membuktikan hipotesa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah alasan mengapa pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi Sekolah Korea Utara di Jepang. Sesuai dengan hipotesa dalam skripsi ini, Pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi Sekolah Korea Utara di Jepang dikarenakan oleh dua faktor yaitu adanya tuntutan dari Kelompok *Zaitoku-kai* untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara di Jepang dan sebagai bentuk *hard power* pemerintah Jepang untuk mendesak Korea Utara agar menyelesaikan kasus penculikan pada tahun 1970-an dan 1980-an serta mendesak Korea Utara untuk menghentikan uji coba maupun pengembangan nuklir.

#### **A. Tuntutan Kelompok *Zaitoku-kai***

Sistem Politik merupakan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gabriel A. Almond, Studi Perbandingan Sistem Politik, Op.Cit, hal. 24.

Kebijaksanaan atau output dalam skripsi ini adalah pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* terutama program *High School Enrollment Support Fund* (karena *Free Tuition Fee at Public High Schools* diperuntukan bagi sekolah negeri Jepang). Kebijakan ini muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan bernama *Zaitokukai*.

Jepang sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya menghargai jalannya kebebasan dalam memberikan pendapat. Penyampaian aspirasi untuk merubah suatu kebijakan yang ada dapat dilakukan dengan bergabung atau membentuk suatu kelompok kepentingan. Di Jepang, terdapat berbagai kelompok kepentingan baik dengan kepentingan ekonomi, politik, maupun sosial.<sup>2</sup> *The Zainichi Tokken wo Yurusanai Shimin no Kai* (Kelompok masyarakat yang tidak menerima adanya hak istimewa bagi penduduk etnis Korea di Jepang), yang lebih populer disebut dengan *Zaitokukai* merupakan salah satu kelompok kepentingan yang cukup berperan di Jepang. Kelompok *Zaitokukai* merupakan kelompok ekstrimis sayap kanan anti-Korea yang menolak keberadaan etnis Korea di Jepang.

Kelompok ini merupakan kelompok anomik yaitu kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, serta pada umumnya melakukan tindakan non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan,

---

<sup>2</sup> Edwin O. Reischauer, Sistem Politik Jepang, Op.Cit, hal. 231.

tindakan kekerasan politik dan sebagainya.<sup>3</sup> *Zaitokukai* dibentuk oleh Makoto Sakurai pada 2 Desember tahun 2006. Makoto menggunakan media internet untuk mengorganisir anggota kelompoknya yang saat ini disinyalir berjumlah 15.000 orang. *Zaitokukai* diketahui sebagai organisasi yang berkumpul di jalan untuk menyerang etnis Korea secara verbal terutama di distrik Tokyo yaitu Shin-Okubo dan distrik Osaka yaitu Tsuruhashi yang keduanya dikenal sebagai *Korea Town*. *Zaitokukai* memiliki tujuan untuk memusnahkan *special privileges* yang dimiliki oleh etnis Korea di Jepang, terutama status *special permanent residency*.<sup>4</sup>

### **1. Artikulasi Kepentingan**

Sebagai suatu kelompok kepentingan, *Zaitokukai* harus dapat menjalankan fungsinya dengan mempengaruhi sktruktur pembuatan keputusan politik agar tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai dapat terealisasikan. *Zaitokukai* berperan dalam melakukan artikulasi kepentingan di dalam sistem politik di mana mereka menyampaikan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Menurut Almond, terdapat beberapa saluran penting bagi kelompok kepentingan untuk menjalankan fungsinya yang terbagi atas dua tipe yaitu *Constitutional Access Channels* melalui demonstrasi, hubungan pribadi, perwakilan langsung di badan legislatif dan birokrasi, serta saluran formal dan institusional lain yaitu

---

<sup>3</sup> Gabriel A. Almond, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik," dalam Perbandingan Sistem Politik, ed. Mohtar Mas' oed dan Colin McAndrews (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997), 54-56.

<sup>4</sup> Agence France Presse, "Anti-Korean 'hate speech' in Japan ruled illegal," Capital News, <http://www.capitalfm.co.ke/news/2013/10/anti-korean-hate-speech-in-japan-ruled-illegal/> (diakses pada 1 Januari 2015).

media masa, partai politik serta badan legislatif, kabinet, dan birokrasi. Sedangkan tipe kedua adalah *Coercive Access Channels* yakni melalui kekerasan.<sup>5</sup>

Dalam menyampaikan kepentingannya, *Zaitokukai* menggunakan beberapa saluran yang termasuk dalam tipe *Constitutional Access Channels*. Beberapa saluran tersebut meliputi demonstrasi, hubungan personal dan melalui penggunaan media masa. Kelompok *Zaitokukai* menggunakan saluran berupa demonstrasi yaitu dalam bentuk *Hate Speech*. Taktik ini digunakan oleh kelompok *Zaitokukai* yang tidak memiliki kekuatan seperti akses untuk mempengaruhi pembuat keputusan secara langsung. Selain itu, demonstrasi merupakan ciri khas dari kelompok kepentingan anomik. Hingga saat ini, *Zaitokukai* telah banyak melakukan aksi *hate speech* yang menimbulkan kontroversi karena melakukan diskriminasi rasial terutama terhadap etnis Korea di Jepang. Aksi yang mereka lakukan terutama terhadap sekolah Korea Utara di Jepang adalah dengan meneriakkan slogan seperti “Throw Korean schools out of Japan” dan “This is a front for training North Korean spies”.<sup>6</sup> *Hate speech* yang dilakukan di Jepang berlangsung dengan dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan mengungkapkan pendapat atau berbicara. Banyak negara di dunia memiliki organisasi sayap-kanan, namun negara seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Australia melarang adanya *hate speech* dengan isu kebencian terhadap kewarganegaraan, ras atau agama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics : System, Process, and Policy*, Op.Cit., hal. 178-189.

<sup>6</sup> Agence France Presse, Anti-Korean ‘hate speech’ in Japan ruled illegal, Op.Cit.

<sup>7</sup> Kyla Ryan, “Japan: Hate Speech vs Free Speech,” *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2012/11/can-an-election-right-japans-course/?allpages=yes> (diakses pada 2 September 2014).

Saluran lain yang digunakan oleh kelompok *Zaitokukai* adalah melalui hubungan pribadi dengan pejabat pemerintahan. Saluran ini merupakan cara yang tradisional yakni dengan menyampaikan kepentingan kepada elit politik dengan menggunakan ikatan keluarga, sekolah, lokal maupun sosial. Pemerintahan Shinzo Abe beserta partainya yaitu Partai Demokratik Liberal, terutama setelah terpilihnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada tahun 2012, memang dikenal dengan pandangan yang nasionalis. Sehingga dalam proses pembuatan keputusan, pandangan nasionalis ini tentu mempengaruhi hasil dari kebijakan yang ada. Salah seorang anggota Kelompok *Zaitokukai* yang merupakan kelompok ultra-nasionalis diketahui memiliki hubungan dengan *National Public Safety Commission chairwoman* Eriko Yamatani. Dalam acara yang membicarakan tentang hubungan Jepang dengan Korea Selatan pada tahun 2009, Yamatani pernah berfoto bersama dengan anggota kelompok *Zaitokukai* yang bernama Shigeo Masuki. Keduanya telah saling mengenal selama 10 tahun karena memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang pendidikan. Selain itu, Yamatani bertanggung jawab dalam mengusut kasus penculikan oleh Korea Utara.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Yamatani dan Masuki yang telah lama saling mengenal dapat saling menyampaikan pesan dengan cara bertatap muka. Tentu nya cara ini merupakan cara yang efektif bagi Masuki sebagai anggota kelompok *Zaitokukai* untuk menyalurkan kepentingan yang menguntungkan bagi kelompok nya. Kepentingan tersebut adalah untuk melobi pemerintah agar tidak

---

<sup>8</sup> Yuya Shino, "Japan minister denies ties to hate speech group, government says," <http://www.reuters.com/article/2014/09/18/us-japan-politics-photos-idUSKBN0HD0KN20140918> (diakses pada 10 Mei 2015).

memberikan bantuan dana pendidikan bagi sekolah Korea Utara di Jepang yang dialamatkan kepada kabinet dan partai yang berkuasa.

Kelompok *Zaitokukai* juga menggunakan media masa untuk menyalurkan kepentingannya. Media masa menjadi sarana utama bagi kelompok *Zaitokukai* selain dengan turun langsung ke jalan untuk melakukan *hate speech*. Media masa berupa media internet digunakan dengan cara mengupload video aksi *hate speech* yang telah dilakukan dan merilis berbagai artikel yang menyebarkan ide rasisme untuk menciptakan kebencian dan diskriminasi rasial.<sup>9</sup> Media internet tersebut adalah *website* resmi milik kelompok *Zaitokukai* yang bernama [www.zaitokukai.info](http://www.zaitokukai.info) yang seluruhnya dimuat dalam bahasa Jepang. Selain itu, kelompok ini juga mengupload video *hate speech* mereka ke *website* video streaming Jepang yang bernama niconico dengan alamat <https://sp.nicovideo.jp>. Namun kemudian pada Mei 2015, niconico menghapus video-video tersebut karena dianggap memuat unsur kekerasan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka melalui tiga saluran yaitu demonstrasi, hubungan pribadi dan media masa maka kelompok *Zaitokukai* dapat menyampaikan tuntutan mereka yakni untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada sekolah Korea Utara di Jepang karena sekolah Korea Utara dianggap tidak memenuhi syarat dan diindikasikan mengajarkan nilai-nilai komunisme.

---

<sup>9</sup> Japan Committee of The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, "Rise of Hate Speech in Japan," Japan Human Right, <http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2013/12/rise-of-hate-speech-in-japan.html> (diakses pada 2 Maret 2015).

## 2. Sekolah Korea Utara Tidak Memenuhi Syarat

Setiap siswa berhak mendapat bantuan dana pendidikan berdasarkan kebijakan pada tahun 2010. Namun, karena bantuan ini tidak hanya diperuntukan bagi siswa di sekolah Jepang saja tetapi juga diperuntukan bagi sekolah asing atau internasional di Jepang, maka diperlukan adanya persyaratan bagi sekolah yang menginginkan untuk menerima bantuan tersebut. Untuk dapat menerima bantuan dana pendidikan berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* terutama program *High School Enrollment Support Fund* (karena *Free Tuition Fee at Public High Schools* diperuntukan bagi sekolah negeri Jepang) harus memenuhi beberapa syarat.

Pertama, siswa harus bersekolah di sekolah negeri maupun swasta (baik *full-time*, *part-time*, dan memiliki kesamaan kurikulum) yaitu perguruan tinggi teknologi (siswa tahun pertama sampai ketiga), *specialized training colleges*, dan *miscellaneous schools* yang diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Syarat yang kedua adalah siswa mengisi formulir yang dikumpulkan melalui sekolah di mana harus ada bukti yang menunjukkan pendapatan orangtua.

Sekolah asing di Jepang diklasifikasikan sebagai *miscellaneous schools* di bawah *School Education Law*, yang berarti bahwa sekolah tersebut tidak terakreditasi secara domestik. Lulusan dari sekolah asing tidak dapat mengikuti ujian masuk sekolah menengah atas tanpa meraih sertifikat yang setara dari sekolah menengah pertama kemudian mengikuti ujian terpisah. Mereka juga harus

lulus ujian *daiken* jika ingin dapat mengikuti ujian masuk universitas.<sup>10</sup> Untuk dapat memperoleh bantuan dana pendidikan, *Miscellaneous schools* harus diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Sekolah juga harus menggunakan *textbooks* yang diterima atau diakui oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan harus mengikuti pedoman mengajar yang telah disiapkan oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* serta mengajarkan kepada siswa berdasarkan pedoman tersebut.

Namun pada kenyataannya, Sekolah Korea Utara diyakini oleh kelompok *Zaitokukai* mengajarkan nilai-nilai komunisme di mana materi yang diajarkan di sekolah Korea Utara disediakan oleh *Chongryon* dan sebagian disetujui oleh pemerintah Korea Utara. Sekolah Korea Utara mengajarkan semua pelajaran dengan bahasa Korea, kecuali dalam pelajaran Bahasa Jepang dan Inggris. Karena mereka tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah Jepang), mereka bebas membuat kurikulum termasuk buku pelajaran yang digunakan di sekolah.<sup>11</sup> Buku pelajaran dibuat oleh perusahaan penerbitan yang terhubung dengan *Chongryon* dan tidak jarang juga dikirimkan dari Korea Utara. Hal ini yang membuat sekolah Korea Utara dianggap oleh kelompok *Zaitokukai* menyebarkan nilai komunisme dan propaganda anti Jepang.

---

<sup>10</sup> Kaho Shimizu, "Miscellaneous institutions facing double standard?", *The Japan Times*, <http://www.japantimes.co.jp/news/2001/10/20/national/miscellaneous-institutions-facing-double-standard/#.VQhFtY6UfpA> (diakses pada 5 Maret 2015).

<sup>11</sup> Mutsumi Matsumoto, "Education Policy for Korean minority in Japan," *welfareasia* web site, [http://welfareasia.org/2ndconference/paper/Mutsumi%2520Matsumoto\\_Paper%282ndEASP%29.doc+%cd=1&hl=id&ct=clnk](http://welfareasia.org/2ndconference/paper/Mutsumi%2520Matsumoto_Paper%282ndEASP%29.doc+%cd=1&hl=id&ct=clnk) (diakses pada 18 September 2014).



Sekolah Korea Utara di Jepang juga diindikasikan oleh kelompok *Zaitokukai* digunakan sebagai media untuk mengajarkan anak-anak sebagai mata-mata di Jepang. Hal ini didukung dengan suasana sekolah yang sama seperti sekolah yang berada di Korea Utara pada umumnya. Foto Kim Il Sung sebagai *founding father* Korea Utara dan Kim Jong Il menghiasi setiap sudut sekolah, baik di ruangan kelas maupun di asrama. Siswa-siswi mengenakan seragam sekolah berupa seragam khas sekolah di Korea Utara yang dipandang buruk oleh masyarakat Jepang.

Jika kita kaitkan dengan syarat untuk memperoleh bantuan dana pendidikan, dapat dikatakan bahwa Sekolah Korea Utara di Jepang tidak memenuhi syarat karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk mendapat bantuan pendidikan siswa harus bersekolah di sekolah negeri maupun swasta yang diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Dalam kurikulum tersebut, sekolah harus menggunakan *textbooks* dan pedoman mengajar yang diterima atau diakui oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*. Namun sekolah Korea Utara membuat kurikulum dan buku pedomannya sendiri yang dipasok oleh pemerintah Korea Utara. Pada tahun 2003, kementerian pendidikan Jepang memasukan sekolah Korea Utara dalam kategori sekolah yang sistem pembelajarannya tidak diakui secara resmi sebagai koresponden terhadap kurikulum umum dari *native country*. Sekolah Korea Utara termasuk dalam

kategori ini karena Jepang dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini.<sup>12</sup>

### **3. Pembuatan Keputusan**

Kelompok *Zaitokukai* sebagai kelompok ekstrimis sayap kanan yang notabennya menolak keberadaan etnis Korea di Jepang melakukan *Hate Speech* di depan sekolah Korea Utara dan juga menyebarkan video maupun slogan-slogan kebencian di internet, kelompok *Zaitokukai* menyalurkan tuntutan mereka agar didengarkan. Setelah tuntutan disampaikan, tuntutan tersebut digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan di mana yang berperan adalah birokrat dan partai politik. Kemudian alternatif-alternatif kebijaksanaan tersebut dipertimbangkan dan ditentukan pilihannya dari alternatif-alternatif yang tersedia. Proses ini berlangsung di parlemen dengan adanya diskusi-diskusi dari masing-masing fraksi atau parpol.

Partai Demokratik Liberal memiliki perang yang penting dalam menjadikan tuntutan dari kelompok *Zaitokukai* sebagai suatu kebijaksanaan. Di dalam sistem politik Jepang, birokrasi dan Diet menjadi aktor inti dari proses pembuatan keputusan. Partai yang berkuasa mempengaruhi proses politik secara langsung karena anggota Partai Demokratik Liberal (sebagai partai yang berkuasa) dalam Diet menangani isu-isu penting yang dituntut oleh kelompok-kelompok penekan tertentu. Sehingga partai yang berkuasa bisa mempengaruhi pembuatan keputusan nasional pada tingkat paling bawah dalam setiap

---

<sup>12</sup> Adam Beije, "The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities," *New Zealand Journal of Asian Studies* 11 (2009) : 123.

perundang-undangan.<sup>13</sup> Proses pembuatan keputusan di Jepang sebagian besar merupakan hasil dari pertemuan komite dalam Partai Demokratik Liberal daripada pertemuan Diet.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintahan Shinzo Abe saat ini beserta partai pendukung nya yaitu Partai Demokratik Liberal dikenal dengan pandangan yang nasionalis. Sehingga dalam proses pembuatan keputusan, pandangan nasionalis ini tentu mempengaruhi hasil dari kebijakan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya hubungan pribadi antara anggota kelompok *Zaitokukai* dengan pejabat pemerintahan yang memungkinkan adanya lobi politik sehingga tuntutan tersebut dapat menghasilkan kebijakan atau keputusan yaitu tidak memberikan subsidi bagi sekolah Korea Utara.

Adanya kesepahaman antara *Zaitokukai* dengan Partai Demokratik Liberal mengenai keterkaitan sekolah Korea Utara dengan *Chongryon* akhirnya membuat sekolah Korea Utara dirasa tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan tersebut. Pada akhirnya, terbentuklah kebijaksanaan (output) yakni suatu kebijaksanaan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakat domestik yang selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik. Kebijaksanaan tersebut terlihat dari pernyataan *The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* yang menjelaskan bahwa 10 sekolah Korea Utara yang mengajukan proposal untuk menerima bantuan dana pendidikan sejak tahun 2010 telah ditolak pada Februari 2013. Menteri Pendidikan Jepang Hakubun

---

<sup>13</sup> Edwin O. Reischauer, Sistem Politik Jepang, Op.Cit, hal. 229.

Shimomura pada 19 Februari 2013 mengatakan alasan dari penolakan tersebut bahwa “The schools are under the influence of the General Association of Korean Residents in Japan (Chongryon) and (making them eligible for the program) may violate the Basic Law of Education, which stipulates that ‘education shall not be subject to improper control.’”<sup>14</sup>

## **B. *Hard Power* Pemerintah Jepang**

*Hard Power* adalah kemampuan untuk menggunakan “*sticks*” dan “*carrots*” (menggunakan strategi ancaman atau paksaan) baik melalui kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi pihak lain. Pemerintah Jepang telah membuat kebijakan untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah Korea Utara. Selain karena adanya tuntutan dari kelompok *Zaitokukai*, alasan lain pemerintah Jepang menolak untuk memberikan bantuan dana pendidikan adalah sebagai bentuk *hard power* pemerintah Jepang untuk mendesak penyelesaian kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an serta penghentian uji coba nuklir Korea Utara. Isu penculikan dan nuklir merupakan isu yang penting dalam hubungan bilateral Jepang dengan Korea Utara sehingga pemerintah Jepang merasa perlu untuk menggunakan *hard power* demi terciptanya penyelesaian.

### **1. Isu Penculikan Dan Nuklir**

Isu penculikan merupakan isu yang mengancam keamanan nasional Jepang. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak warga Jepang yang menghilang secara tidak wajar. Berbagai investigasi yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Masami Ito, “Pro-Pyongyang schools barred from tuition waiver,” Japan Times, <http://www.japantimes.co.jp/news/2013/02/21/national/pro-pyongyang-schools-barred-from-tuition-waiver/#.VXWxRc-gqkr> (diakses pada 18 Oktober 2015).

pemerintah Jepang dan testimoni dari agen Korea Utara yang telah ditangkap menunjukkan adanya kemungkinan yang kuat bahwa kasus penculikan ini dilakukan oleh Korea Utara. Sejak tahun 1991, pemerintah Jepang selalu menyampaikan kasus ini pada setiap kesempatan yang ada. Namun Korea Utara selalu mengelak keterlibatan mereka. Pada pertemuan antara Japan-DPRK (*The Democratic People's Republic of Korea*) yang dilaksanakan September 2002, Kim Jong Il mengakui untuk pertama kalinya bahwa Korea Utara telah menculik warga Jepang. Korea Utara meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut serta mencegah untuk terjadinya hal yang serupa di masa depan.<sup>15</sup>

Tabel 4.1 Korban Penculikan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Jepang<sup>16</sup>

No.	Nama	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Waktu Penculikan
1.	Yutaka Kume	52	Laki-laki	19 September 1977
2.	Kyoko Matsumoto	29	Perempuan	21 Oktober 1977
3.	Megumi Yokota	13	Perempuan	15 November 1977
4.	Minoru Tanaka	28	Laki-laki	Juni 1978
5.	Yaeko Taguchi	22	Perempuan	Juni 1978
6.	Yasushi Chimura	23	Laki-laki	7 Juli 1978

<sup>15</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Abductions of Japanese Citizens by North Korea," Ministry of Foreign Affairs of Japan, [https://www.google.co.id/search?q=mofa+abduction&og=mofa+abduction&ags=chrome..69i57.4124j0j4&sourceid=chrome&es\\_sm=93&ie=UTF-8#](https://www.google.co.id/search?q=mofa+abduction&og=mofa+abduction&ags=chrome..69i57.4124j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#) (diakses pada 8 April 2015).

<sup>16</sup> Secretariat of the Headquarters for the Abduction Issue, "Individual Cases - 17 Abductees Identified by the Government of Japan," Abductions of Japanese Citizens by North Korea, <http://www.rachi.go.jp/en/ratimondai/jian.html#jian09> (diakses pada 12 April 2015).

7.	Fukuie Chimura	23	Perempuan	7 Juli 1978
8.	Kaoru Hasuike	20	Laki-laki	31 Juli 1978
9.	Yukiko Hasuike	22	Perempuan	31 Juli 1978
10.	Shuichi Ichikawa	23	Laki-laki	12 Agustus 1978
11.	Rumiko Masumoto	24	Perempuan	12 Agustus 1978
12.	Hitomi Soga	19	Perempuan	12 Agustus 1978
13.	Miyoshi Soga	46	Perempuan	12 Agustus 1978
14.	Toru Ishioka	22	Laki-laki	Mei 1980
15.	Kaoru Matsuki	26	Laki-laki	Mei 1980
16.	Tadaaki Hara	43	Laki-laki	Juni 1980
17	Keiko Arimoto	23	Perempuan	Juli 1983

Pada bulan Oktober 2002, lima korban penculikan telah dipulangkan ke Jepang dari Korea Utara setelah 24 tahun lamanya. Seperti yang dituliskan dalam tabel di atas, sejauh ini pemerintah Jepang telah mengidentifikasi 17 warga Jepang meliputi lima orang yang telah dipulangkan. Warga Jepang yang telah dipulangkan tersebut adalah Yasushi Chimura, Fukiie Chimura, Kaoru Hasuike, Yukiko Hasuike dan Hitomi Soga. Sementara itu, korban penculikan yang lain ada yang diakui tidak diculik oleh Korea Utara dan ada juga yang dinyatakan telah meninggal dunia namun belum ada bukti yang valid mengenai informasi tersebut.

Di Jepang, terdapat beberapa kampanye yang aktif menyuarakan untuk menyelamatkan para korban penculikan. Pada tahun 1997 didirikan *The Association of the Families of Victims Kidnapped by North Korea* yang membuat

petisi dari 10 juta orang (hingga April 2013) dan petisi tersebut telah diserahkan kepada Perdana Menteri Jepang. Selain itu, pada Januari 2013 Pemerintah Jepang membentuk “Headquarters for the Abduction Issue” yang meliputi semua menteri negara yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pendekatan strategis dan komprehensif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perdana Menteri, Shinzo Abe, berperan sebagai pemimpin *The Head and Minister of State for the Abduction Issue*, sedangkan *The Chief Cabinet Secretary* dan *The Foreign Minister* berperan sebagai deputi.<sup>17</sup>

Selain isu penculikan, isu senjata pemusnah masal atau nuklir menjadi ancaman yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Jepang. Korea Utara, negara yang berada sangat dekat dengan Jepang, hingga saat ini telah mengembangkan senjata nuklirnya. Untuk mencari solusi damai atas program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, maka terbentuklah suatu perundingan yaitu *The Six Party Talks* diantara enam negara yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Perundingan ini terbentuk dikarenakan pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT)<sup>18</sup>. Sejak tahun 2003 hingga 2007 telah diadakan enam kali perundingan namun tidak menghasilkan jalan terang dikarenakan Korea Utara yang terus melakukan tes misil dan provokasi-provokasi. Korea Utara beberapa kali bersedia untuk meredam tindakannya namun hal ini berakhir pada jalan buntu ketika pada tahun 2009, Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) merupakan perjanjian untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir suatu negara yang ditandatangani pada 1 Juli 1968.

ini. Pada akhir tahun 2012 Korea Utara kembali meluncurkan misil jarak jauhnya dan beberapa uji coba nuklir lainnya pada awal tahun 2013 hingga saat ini.

Menanggapi kedua isu tersebut, sebenarnya pemerintah Jepang telah mengupayakan penyelesaian melalui jalur dialog-dialog atau menggunakan *soft power* nya. Seperti dialog pada Maret 2014 untuk membicarakan lagi masalah penculikan yang sempat terhenti pada tahun 2012. Dialog ini merupakan hasil dari diplomasi Jepang melalui beberapa pertemuan rahasia dengan Korea Utara sejak Oktober 2013. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dialog mengenai nuklir dengan Korea Utara mengalami kebuntuan. Upaya-upaya dengan menggunakan *soft power* melalui dialog tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah sehingga pemerintah Jepang menggunakan *hard power*.

## **2. Penggunaan *Carrots***

*Hard Power* adalah kemampuan untuk menggunakan “*sticks*” dan “*carrots*” baik melalui kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi pihak lain. Meskipun penggunaan *hard power* tidak lagi menjadi prioritas dan telah digantikan oleh *soft power*, namun penggunaannya masih dapat menjadi alternatif bagi suatu negara untuk memaksa pihak lain mengikuti apa yang diinginkan. Pada prinsipnya, dalam mempengaruhi pihak lain sebisa mungkin penggunaan *carrots* lebih diutamakan daripada penggunaan *sticks*. Jika iming-iming hadiah atau bujukan tidak berhasil membuat suatu pihak mengikuti keinginan dari pihak lain, maka barulah *sticks* bisa dipertimbangkan. Dalam kasus ini, pemerintah Jepang menggunakan “*Inducements and payments*” (*carrots*) atau bujukan untuk mempengaruhi pihak lain yaitu Korea Utara agar bersedia untuk segera



menyelesaikan masalah penculikan maupun nuklir. Pemerintah Jepang memberikan iming-iming berupa pemberian subsidi pendidikan berdasarkan program *Fee Tuition Free At Public High School And High School Enrollment Support Fund* bagi Sekolah Korea Utara di Jepang jika pemerintah Korea Utara bersedia untuk menyelesaikan kasus penculikan dan nuklir.

Subsidi pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sekolah Korea Utara. Sekolah Korea Utara di Jepang tentunya membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan segala aktifitas dan kegiatan di sekolah seperti biaya operasional berupa gaji guru dan pegawai sekolah, biaya bagi sarana prasarana penunjang belajar siswa dan lain-lain. Sumber dana atau biaya di sekolah Korea Utara sangat mengandalkan dari sumbangan yang telah dikurangi dengan pajak, pembayaran, dan bantuan regional (dari pemerintah prefektur/lokal). Selain itu pemerintah Korea Utara juga memberikan dana bantuan kepada sekolah Korea Utara. Namun, bantuan yang diperoleh dari pemerintah lokal dan dari pemerintah Korea Utara sangat kecil.<sup>19</sup>

Minimnya sumber dana yang dimiliki sekolah Korea Utara di Jepang membuat biaya sekolah yang harus dibayar oleh orang tua siswa menjadi tinggi namun dengan fasilitas yang jauh dibawah jika dibandingkan dengan sekolah Jepang. Akibatnya beberapa orang tua sudah menyerah mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-Sekolah Korea Utara dan mengirim mereka ke sekolah-sekolah Jepang yang mendapat subsidi. Sekolah Jepang mendapatkan subsidi dari program *Fee Tuition Free At Public High School* yakni sekolah menengah atas negeri tidak

---

<sup>19</sup> Beije, *The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities*, Op.Cit., hal. 118.

mengharuskan untuk memungut biaya sekolah. Sehingga orang tua siswa tidak harus membayar biaya sekolah (kecuali biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas). Padahal sekolah Korea Utara mengharuskan orang tua untuk membayar biaya sekolah sebesar 30.000 yen.

Hasilnya, adanya program *Fee Tuition Free At Public High School And High School Enrollment Support Fund* khususnya *High School Enrollment Support Fund* menjadi harapan baru bagi sekolah Korea Utara untuk mendapatkan bantuan dana selain dari sumber dana yang telah disebutkan di atas. Bantuan dana pendidikan ini telah dibuat untuk mengurangi pengeluaran orangtua siswa baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan lain-lain. Bantuan biaya pendidikan berdasarkan *High School Enrollment Support Fund* adalah sebesar 9.900 yen per bulannya (118.800 yen per tahun) bagi setiap siswa dan dapat bertambah tergantung dari keadaan perekonomian keluarga siswa. Keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5 juta yen per tahun mendapat bantuan sebesar 9.900 yen per bulan (118.800 per tahun), sedangkan keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5-3,5 juta yen per tahun akan mendapat bantuan sebesar 4.950 yen per bulan (59.400 per tahun).<sup>20</sup>

Selama ini, Pemerintah prefektur memberikan bantuan kepada sekolah Korea Utara sejumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Misalnya saja *Kanagawa Joseon Middle and High School* di Yokohama yang memiliki 214 siswa menerima 30 juta yen setiap tahunnya dari prefektur, atau sekitar 150.000

---

<sup>20</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, "Overview of High school enrollment support fund system," Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, [http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/mushouka/index.html](http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html), (diakses pada 25 Desember 2014).

yen per siswa. Namun bantuan tersebut diberhentikan karena adanya uji coba nuklir oleh Korea Utara. Pada tahun 2012, Tokyo, Osaka, Miyagi prefektur, dan Chiba prefektur menghentikan bantuan bagi sekolah Korea Utara. Selanjutnya pada tahun 2013, Kanagawa prefektur, Saitama prefektur, dan Hiroshima prefektur juga melakukan hal yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pentingnya tunjangan biaya bagi Sekolah Korea Utara di Jepang membuat pemerintah Jepang memberikan iming-iming berupa pemberian subsidi pendidikan berdasarkan program *Fee Tuition Free At Public High School And High School Enrollment Support Fund* bagi Sekolah Korea Utara di Jepang jika pemerintah Korea Utara bersedia untuk menyelesaikan kasus penculikan dan nuklir.

### **3. Tujuan *Hard Power***

Pada dasarnya baik *hard* ataupun *soft power* bertujuan untuk meraih apa yang menjadi kepentingan dari pihak yang menggunakannya. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya baik dalam pemerintahan maupun juga yang berlangsung dalam masyarakat luas yang meliputi individu maupun kelompok. *Hard power* yang dilakukan pemerintah Jepang bertujuan untuk meraih kepentingan nasional negaranya, baik dalam pemerintahan maupun juga yang berlangsung dalam masyarakat luas yang meliputi individu maupun kelompok.

Dalam kasus ini, pemerintah Jepang memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui subsidi pendidikan. Masyarakat Jepang merasa resah jika akan terjadi lagi penculikan yang membuat mereka memandang etnis Korea di

Jepang sebagai ancaman. Kepentingan nasional yang ingin dicapai adalah kepentingan keamanan. Keamanan dalam lingkup masyarakat yaitu yang merasa terancam akan penculikan dan mata-mata Korea Utara serta keamanan dalam lingkup negara yaitu nuklir Korea Utara yang mengancam karena posisi geografis Jepang yang dekat dengan Korea Utara.

Sampai saat ini Korea Utara belum memberikan keterangan yang memuaskan maupun bukti yang menunjukkan bahwa korban penculikan lainnya dalam keadaan aman dan akan segera dipulangkan ke Jepang. Pemerintah Jepang pun secara aktif menuntut Korea Utara untuk melakukan investigasi bersama dalam menangani masalah ini. Penculikan oleh Korea Utara merupakan isu yang penting karena terkait dengan kedaulatan Jepang dan kehidupan serta keamanan warga Jepang yang harus diselesaikan oleh pemerintah nasional Jepang.<sup>21</sup>

Selain itu, uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara meresahkan masyarakat internasional. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menyebut uji coba nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran berat karena mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang mengancam perdamaian internasional. Jepang sebagai negara yang berada dekat dengan Korea Utara merasa terancam dengan adanya nuklir tersebut.

Menanggapi tindakan pemerintah Jepang, pada 20 Februari 2015 ratusan siswa sekolah Korea Utara melakukan unjuk rasa untuk menuntut subsidi bagi sekolah pro-Pyongyang di Jepang. Mereka memprotes keputusan pemerintah pada tahun 2013 untuk tidak memberikan subsidi pendidikan bagi sepuluh sekolah

---

<sup>21</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, Abductions of Japanese Citizens by North Korea, Op.Cit.

Korea Utara.<sup>22</sup> Sampai saat ini, terdapat 17 sekolah internasional, 8 sekolah Brazilian, dan 2 sekolah Chinese yang telah menerima subsidi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah empat sekolah Korea di Jepang yang berafiliasi dengan Korea Selatan yang diikutsertakan dalam bantuan dana pendidikan oleh pemerintah Jepang dalam program tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari penjelasan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok *Zaitokukai* menuntut pemerintah untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi sekolah Korea Utara di Jepang karena selain tidak memenuhi syarat, kelompok *Zaitokukai* mengindikasikan sekolah Korea Utara mengajarkan nilai-nilai komunisme dan menjadi tempat untuk mendidik mata-mata yang dapat dilihat dari kurikulum dan buku penunjang yang digunakan di sekolah tersebut. *Zaitokukai* mengartikulasikan kepentingannya melalui *Hate Speech* yang kemudian mempengaruhi pembuat keputusan. Selain itu, alasan pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara adalah karena Korea Utara belum menyelesaikan masalah penculikan warga Jepang serta masih mengembangkan juga melakukan uji coba nuklir. Oleh karena itu, pemerintah Jepang merasa perlu untuk melakukan *carrot* dengan iming-iming bantuan dana pendidikan bagi Sekolah Korea Utara di Jepang.

---

<sup>22</sup> Agence France-Presse, "Ethnic Koreans rally in Japan for education subsidies," Global Post, <http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/150220/ethnic-koreans-rally-japan-education-subsidies> (diakses pada 10 Juli 2015).

<sup>23</sup> Eric Talmadge, "Japan turns up pressure on pro-Pyongyang schools," The Big Story, <http://bigstory.ap.org/article/japan-turns-pressure-pro-pyongyang-schools> (diakses pada 28 Desember 2014).